

RANCANG BANGUN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP KONFLIK LAUT NATUNA UTARA

Oleh:

Dirga Repindo Agustiyani¹⁾, Widodo²⁾, Panji Suwarno³⁾

^{1,2,3}Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia

¹email: dirga.unsri@gmail.com

²widodo_unhan2017@yahoo.com

³email: panji.suwarno@idu.ac.id

Abstrak

Dalam suatu tatanan negara yang berdaulat pasti membutuhkan suatu rancangan bangun politik luar negeri dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis. Dalam hal konteks Indonesia, politik luar negeri Indonesia dapat dikategorikan sebagai prinsip bebas dan aktif. Dewasa ini perselisihan antara dua negara besar seperti Amerika dan China semakin memanas dalam diskursus Laut Natuna Utara, ditambah lagi dengan meningkatnya dinamika lingkungan strategis khususnya di kawasan Asia-Pasifik yang secara langsung berdampak pada kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Sehingga dibutuhkan suatu analisis mengenai apa saja dan bagaimana faktor internal maupun eksternal Indonesia dapat mempengaruhi rancang bangun politik luar negeri Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan didukung studi literatur. Adapun temuan yang didapat adalah faktor internal yang didapat menggunakan teori politik luar negeri dari Howard Lentner dengan pendekatan *Moderately stable determinants* yang difokuskan pada pengaruh gaya politik suatu negara dalam hal ini Indonesia terhadap dinamisasi konflik Laut Natuna Utara. Sedangkan rancang bangun politik pada faktor eksternal menggunakan teori politik luar negeri dari Rosenau pada poin *systemic source* atau sumber sistemik dalam artian lebih mengkaitkan pada pengaruh aliansi berupa kerjasama-kerjasama Internasional melibatkan negara-negara besar. Dalam hal ini Indonesia sangat memanfaatkan kesempatan pertemuan Internasional dalam hal menengahi konflik Laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Politik Luar Negeri Indonesia, Dinamika Laut Natuna Utara, *Moderately Stable Determinants*, *Systemic Source*

1. PENDAHULUAN

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki hubungan antar negara lainnya dalam menghadapi dinamisasi lingkungan strategis. Untuk menghadapi situasi demikian diperlukannya konsep hubungan antar negara dalam menjaga perdamaian dunia. Selain itu, masing-masing negara di dunia memiliki sistem strategis dalam menghadapi tantangan dan ancaman Negara. Keseluruhan konsep tersebut disebut dengan politik luar negeri. Charles Beard menyatakan bahwa "*Foreign relations and Domestic affairs are intimately linked, often both are but different perspective of the same thing*". Pernyataan tersebut cukup jelas menggambarkan kompleksitas isu domestik seperti keamanan kontemporer, demokratisasi dan korelasinya dengan diplomasi serta politik luar negeri. Konsep dalam pernyataan Charles menyatakan bahwa dalam memahami politik luar negeri suatu negara tidak terlepas dari batas-batas yang menjadi indikator tata interaksi sosial manusia. Konsep-konsep tersebut juga dianggap sebagai pemahaman paling heterogen yang berjalan dinamis sesuai perkembangan manusia di dunia terhadap hasil globalisasi saat ini (Perwinta, 2007).

Jika berbicara mengenai sejarah politik luar negeri Indonesia, secara historis latar belakang kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan pengorbanan jiwa para pendiri bangsa yang mendedikasikan untuk menginisiasi konsep politik

luar negeri Indonesia yang tangguh. Contohnya pada prinsip politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif dari Mohammad Hatta yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak tergantung atau cenderung dengan nilai ideologis kapitalis maupun komunis yang populer saat itu, namun juga Indonesia bukan ideologi yang menutup diri dengan ditunjukkan keterlibatan dalam forum internasional demi mendukung tujuan nasional (Noventari, 2014).

Kondisi pemerintahan Indonesia sekarang tepatnya di era Presiden Joko Widodo menyiratkan beberapa perubahan politik luar negeri Indonesia dahulu dan sekarang. Kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Jokowi sangat diperhatikan dalam hal politik luar negerinya yang berorientasi kedalam (*inward-looking*). Prinsip politik bebas-aktif dalam konsep *inward-looking* yang digagas oleh Jokowi dapat membenarkan prinsip kebijakan luar negeri yang dipakai oleh Indonesia saat ini. Pedoman ini memberikan ruang bebas untuk pemaknaan dan klarifikasi oleh siapa pun atau dalam kondisi apa pun. Hal ini secara lugas tercermin dalam rencana visi dan misi politik luar negeri Jokowi, khususnya "pengakuan Indonesia yang otonom, berdaulat, adil, dan memiliki karakter gotong-royong". Visi ini menggarisbawahi pentingnya "peluang" Indonesia melalui pengakuan kebebasan, kekuasaan dan kepribadian publik. Sikap dan sifat "aktif" yang terdapat didalamnya untuk dapat diimplementasikan

sebagai kemandirian nasional atas landasan kerjasama konstruktif dan positif yaitu gotong-roiyong (Situmorang, 2015).

Belakangan ini konflik dua negara besar seperti Amerika dan China semakin memanas dalam diskursus Laut Natuna Utara, ditambah lagi dengan meningkatnya dinamika lingkungan strategis khususnya di kawasan Asia-Pasifik yang secara langsung berdampak pada kebijakan dan politik luar negeri Indonesia.

Laut Cina Selatan atau zona maritim Laut Natuna Utara telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan dapat dikatakan sebagai wilayah maritim dan kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Perselisihan intelah terjadi sekian lama dan menjaga sudut pandang otentik setiap bangsa yang saling mengklaim. Seperti contoh pada studi kasus Filipina yang merilis pelanggaran kapal China di perairan regionalnya antara Vietnam dan China. Langkah yang diambil China sebenarnya adalah keyakinan akan tanggung jawab Laut Natuna Utara sebagai warisan dan keinginan untuk menggunakan potensi besar Laut Natuna Utara untuk menjadi kekuatan mata uang dunia. Negara-negara seperti India, Amerika Serikat, Jepang dan Australia juga tidak berdiam diri menguasai wilayah Laut Natuna Utara yang dapat memberikan manfaat luar biasa bagi perekonomian nasional (Fajrina, 2020).

Terdapat sedikitnya (tiga) alasan utama negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut Natuna Utara, khususnya di Negara Asia Tenggara yang saling berkepentingan mengakui wilayah daratan berupa kepulauan Spratly dan Paracel maupun seluruh kawasan laut di Laut Natuna Utara yaitu (Toruan, 2020):

- 1) Wilayah laut dan kumpulan pulau-pulau di Laut Natuna Utara mengandung aset bumi yang sangat besar, termasuk minyak dan gas serta aset kelautan lainnya.
- 2) Perairan regional LNU adalah perairan regional yang mengisi sebagai jalur persimpangan untuk latihan pengiriman kapal di seluruh dunia, terutama jalur pelayaran lintas laut yang menghubungkan jalur pelayaran Eropa, Amerika dan Asia.
- 3) Dengan globalisasi ekonomi yang tumbuh secara dramatis di Asia, negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan LNU, termasuk Amerika Serikat, sangat bersemangat untuk mengelola dan mempengaruhi kawasan LNU yang secara strategis dianggap sangat berguna bagi perekonomian kawasan.

China telah menduduki banyak pulau dan fitur laut di wilayah yang disengketakan sebagai bukti realisasi klaimnya. Tercatat Tiongkok terus melakukan program reklamasi secara masif dan intensif di kawasan Laut Natuna Utara sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Bahkan di antara rezim Xi Jinping, ditemukan bahwa China jauh lebih aktif di

Laut Natuna Utara daripada pendahulunya, Deng Xiaoping, yang memainkan gaya kebijakan luar negeri yang "tidak mencolok". Dalam pernyataan resmi dari pemerintah di acara Partai Komunis China, terungkap bahwa Xi Jinping mendukung kedaulatannya dan ingin melindungi kepentingan nasional mereka di Laut Natuna Utara. Pembangunan dan ekspansi atau reklamasi pantai di Laut Natuna Utara merupakan sebuah legitimasi infrastruktur bagi China. Menurut gambar satelit yang dilaporkan oleh beberapa media, pengembangan di Laut Natuna Utara oleh China mengarah pada pembangunan fasilitas militer seperti landasan pacu pada tahun 2014 dan baru-baru ini membangun fasilitas militer seperti pertahanan pantai dan rudal anti-kapal. Wilayah Laut Natuna Utara sangat strategis secara militer, terutama karena jalur maritim dan letak perdagangan dunia yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Hindia (Utomo, 2017).

Masalah terbesar adalah pembangunan pulau buatan akan berada di kawasan status quo pada tahun Laut Natuna Utara. Selain melanggar hukum internasional, juga berpotensi meningkatkan ketegangan. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan ketertarikan China membangun pulau buatan. Pertama, klaim kedaulatan di perairan LNU dengan menunjukkan bahwa China telah membangun pangkalan militer di pulau itu untuk mengancam negara-negara tetangga. Menurut Buku Putih Pertahanan China 2019, Pulau LNU adalah bagian dari wilayah China dan diperkirakan akan melanjutkan patroli rutin di daerah tersebut. Kedua, China semakin menekan penduduk setempat. Seperti halnya penduduk Pulau Tou, penduduk Pulau Tou berasal dari Filipina, tetapi pekerjaan administratif berada di bawah yurisdiksi Tiongkok. Tidak hanya itu, China membangun Filipina *Subi Reef* di pulau baru dan melarang penduduk di sekitar pulau untuk mengunjungi pulau itu (Fajri, 2020).

Dari proses dinamika geopolitik di LNU tersebut membuat beberapa negara-negara yang termasuk dalam konflik seperti Amerika Serikat dan Negara *Claimant* LNU melakukan aktivitas manuver di Laut Natuna Utara. Manuver beberapa kapal Angkatan Laut AS di LNU meningkat pada bulan-bulan terakhir tahun 2019, menyusul peningkatan kebebasan navigasi di LNU yang dapat menyebabkan ketegangan antara AS dan China. Namun, patroli angkatan laut AS di LNU berpendapat bahwa mereka hanya dapat mempertahankan akses ke air, menentang klaim maritim yang berlebihan yang memungkinkan negara-negara di kawasan lain termasuk Brunei, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Vietnam untuk memperingatkan kapal perang AS di perairan teritorial LNU (Hutama, 2019).

Dalam kasus Indonesia sendiri, kapal Indonesia diperintahkan untuk melepaskan kapal China yang diperoleh Indonesia sebagai kapal penegak hukum China dalam upaya untuk menahan kapal penangkap ikan China di Laut China Selatan

setidaknya tiga kali pada tahun 2010 dan 2013. Menanggapi perilaku mengancam kapal-kapal China, kapal-kapal Indonesia mengikutinya. Kapal China terus melanggar penangkapan ikan di ZEE Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna, mirip dengan insiden 2010 dan 2013 beberapa bulan terakhir bersama dengan kapal laut China (Conelly, 2017).

Wilayah Indo-Pasifik terdiri dari negara adidaya seperti Jepang, India, Cina dan Amerika Serikat, banyak kekuatan menengah seperti Taiwan, Korea Selatan dan Australia, dan negara-negara kaya di Timur Tengah. Karena kehadiran sejumlah besar negara adidaya dan negara-negara menengah, kawasan Indo-Pasifik berpotensi menjadi muara konflik kepentingan tidak hanya di wilayah pelayaran tersibuk di dunia, tetapi juga di negara-negara kuat yang ingin menguasai rute laut. Kekuatan besar seperti China dan Amerika Serikat sedang membangun perjanjian bilateral dan multilateral untuk mengamankan kepentingan nasional untuk navigasi di kawasan (Montratama, 2016). Oleh karena itu, untuk menyeimbangkan kehidupan Indonesia di lingkungan strategis maka diperlukan sebuah rancang bangun politik luar negeri yang mampu menyelaraskan semua tantangan maupun hambatan kedepan bagi kepentingan Indonesia dimasa mendatang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penulisan deskriptif kualitatif. Metode ini relevan karena akan mampu mengkombinasikan hal-hal yang terasa kontradiktif. Tidak hanya itu, ini juga mampu menemukan garis-garis ketersinggungan positif sehingga kita mampu melihat sebuah fenomena secara lebih komprehensif, mengomparasikannya, mengajukan pertanyaan analitis dan juga mendapatkan perspektif alami dari partisipan. Dengan posisi ini, peneliti memiliki tempat yang kuat dalam menganalisis (Mohajan, 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penggambaran, skema dan penelitian yang sistematis, realistis dan akurat tentang karakter yang sebenarnya, hubungannya dengan status quo, sebagaimana Indonesia merancang struktur politik luar negeri konflik di Laut Natuna Utara berdasarkan faktor internal dan eksternal.

Teknik analisis data yang akan diaplikasikan di dalam penelitian ini adalah teknik Quasi-Kualitatif yang menekankan metode kongruen. Metode kongruen adalah metode mencoba membuktikan bahwa peneliti mampu memecahkan atau memprediksi hasil dari kasus ini secara teori (George & Bennet, 2005). Penulis pertama akan memahami variabel independen kasus dan variabel dependen kasus berdasarkan teori yang digunakan. Penulis kemudian mencari data kasus dan teori yang digunakan bersifat kausal kasus jika dapat membuktikan hasil lapangan. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur,

dimana penulis mencari sumber-sumber dari berbagai literatur dan menafsirkannya dengan pendekatan keilmuan dan metode deskriptif kualitatif atau naturalistik karena melakukan pada kondisi yang alamiah.

3. PEMBAHASAN

Rancang Bangun Politik Luar Negeri Indonesia Menghadapi Konflik LNU Berdasarkan Faktor Internal (Domestik)

Untuk membahas mengenai rancang bangun politik luar negeri Indonesia, penulis dalam hal ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Howard Lentner mengenai sumber politik luar negeri berdasarkan faktor internal dan eksternal yang selanjutnya dikaitkan dengan sikap Indonesia dalam menghadapi konflik LNU. Howard Lentner mengklasifikasikan sumber politik luar negeri menjadi dua kelompok, yaitu pengaruh luar negeri dan pengaruh dari domestik. Pengaruh domestik lebih merujuk kondisi di dalam negeri yang tersusun ke dalam tiga kategori waktu, yaitu (Lentner, 1974):

- 1) *Highly stable determinants*, faktor-faktor yang terdiri atas lokasi, geografi, iklim, kontinental, SDA dan jumlah penduduk.
- 2) *Moderately stable determinants*, yang terdiri atas gaya, budaya, proses maupun kepemimpinan politik.
- 3) *Unstable determinants*, lebih mengarah pada sifat dan argumen jangka panjang serta indikator alamiah.

Maka dari ketiga konsep yang telah dijabarkan oleh Lentner, artikel ini lebih memfokuskan pada pengaruh politik luar negeri Indonesia berdasarkan *moderately stable determinants* yaitu pada sisi gaya politik atau geopolitik Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Natuna Utara.

Dalam kaitannya dengan Indonesia, Indonesia memiliki hubungan internasional yang penting dalam hubungan dunia, selain letaknya yang diapit oleh Samudera Hindia dan Pasifik yang merupakan potensi besar dalam perannya di kancah global, juga memiliki kekayaan tetap (SDA) yang melimpah. Bagaimanapun, negara ini tidak dapat "mengawasi" seperti yang diharapkan dan dengan tepat posisi penting dan kelimpahan aset regulernya. Hal ini dikarenakan ketika masa Bung Karno, Indonesia mampu memajemen geopolitiknya. Selain itu, data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 39 selat, 4 di antaranya termasuk pelayaran terpadat di dunia, seperti *Malacca Strait* atau *Hormuz Strait*. Belakangan ini, hampir setengah perdagangan maritim dunia melewati wilayah teritorial Indonesia dan alur laut di kawasan tersebut. Dari sisi geopolitik, Indonesia berkarakteristik strategis yang sangat penting bagi perdagangan maritim internasional. Artinya, Indonesia memiliki potensi kekuatan besar, yaitu takdir geopolitiknya. Ini akan menjadi pusat perjuangan negara adidaya untuk pengaruh geopolitik dan pusat inti ekonomi global. Wilayah Asia

Tenggara yang mendominasi, wilayah dengan populasi terbesar dan sumber daya alam terkaya di Asia Tenggara, menjadikan Indonesia potensi kekuatan baru dan penstabil utama keamanan kawasan (Hendrajit, 2017).

Mengenai dinamika konflik di Laut Natuna Utara, dalam kasus Indonesia, ketahanan negara bisa terancam jika konflik di LNU tidak ditangani dengan baik meskipun merupakan negara non-claiming. Menurut UUD 1945, menjaga otonomi negara ini sangat penting. Kasus China yang mengklaim kedaulatan teritorial atas wilayah Indonesia menunjukkan betapa pentingnya perbatasan Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus pada wilayah perbatasan. Jangan sampai negara tetangga, terutama Indonesia yang jaraknya ribuan kilometer, mengklaim wilayah tersebut. Selain itu, mampu menyelesaikan konflik LNU dengan benar sangat penting. Jika tidak segera diselesaikan, hal itu dapat menyebabkan eskalasi konflik dengan China, seperti kasus Vietnam dan Filipina, yang memerlukan penggunaan kekuatan militer kecil tapi kecil, baik direalisasikan atau tidak (Pratiwi, 2017).

Strategi desain politik yang digunakan Indonesia dalam menangani konflik LNU melalui pemerintahan Jokowi adalah menekankan pendekatan diplomatik proaktif untuk mencari solusi damai untuk menghindari konflik yang lebih besar. Umar (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagai negara non-klaim, Indonesia bertindak sebagai arbiter yang jujur (*fair intermediary*) dalam menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara. Hal ini dibuktikan oleh keterlibatan Indonesia sebagai penanggung jawab isu tersebut di Laut Natuna Utara dari tahun 1990 hingga 2014. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo terus mendorong dan berpartisipasi aktif dalam mengupayakan terbentuknya *Declaration of Conduct* (DoC) dan kemudian *Code of Conduct* (CoC) untuk menekan ketegangan konflik di Laut Natuna Utara. Pada kesempatan tersebut Indonesia memberikan paradigma mengenai *ASEAN Point Ministers on Peace, Security and Stability in the Region*. Pernyataan ini juga mengintegrasikan suara ASEAN untuk mendukung Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Piagam ASEAN dan TAC dalam menjaga dan memajukan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan serta dalam menjalankan hubungan antar bangsa (Umar, 2020).

Selain itu, sikap politik yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dalam meredam konflik LNU adalah dengan mengganti penamaan Laut China Selatan di peta Indonesia menjadi Laut Natuna Utara. Arif Havas Oegroseno, Deputi Sekretaris Negara Bidang Koordinasi Kelautan, mengatakan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia didasarkan pada dua alasan. Pertama, menghindari ketidakjelasan antar oknum yang ingin memanfaatkan landas kontinen Indonesia. Kedua, memberikan arahan dan petunjuk kepada aparat

hukum TNI AL. Tentu saja regulasi Indonesia mengundang konflik dari China, namun konflik tersebut tidak menyurutkan sikap Indonesia untuk mendaftar dan mempertahankan di forum PBB. Gong Shuang, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengeluarkan pernyataan terkait isu penamaan LNU dalam hubungan Indonesia dan China. Gong Shuang mengatakan LNU telah menjangkau melalui hubungan diplomatik antara China dan Indonesia untuk menangani pelanggaran oleh kapal penangkap ikan China (Ilmi, 2020).

Rancang Bangun Politik Luar Negeri Indonesia Menghadapi Konflik LNU Berdasarkan Faktor Eksternal (Systemic Sources)

Rancang bangun politik luar negeri Indonesia berdasarkan faktor eksternal, penulis lebih menekankan menggunakan teori James N Rosenau. Dimana Rosenau mengkategorikan faktor atau sumber kebijakan luar negeri dengan menempatkannya dalam dua kontinum: kontinum waktu dan kontinum integrasi sistematis. *Systemic sources* atau sumber sistematis yang didapat dari luar negara. Sumber yang menjelaskan struktur hubungan antar negara besar, pola aliansi antar negara, domain masalah dan faktor kontekstual eksternal yang dapat menimbulkan krisis. Hubungan struktural antara kekuatan besar yang dimaksud adalah bagaimana kekuatan kolektif yang membentuk struktur urusan internasional dan kompetensi dan kapasitas antara negara-negara tersebut didistribusikan. Sedangkan faktor situasional eksternal dapat dikatakan sebagai gambaran stimulan yang bersifat spontanitas yang berasal dari situasi Internasional terakhir (Rosenau *et al.*, 1976). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori politik luar negeri sumber sistemik ini merupakan aliansi ataupun hubungan-hubungan organisasi Internasional yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara.

Mengacu pada teori Rosenau mengenai sumber politik luar negeri yaitu sumber sistemik maka erat kaitannya dengan pendekatan-pendekatan diplomasi melalui kerja sama maupun pertemuan Internasional melibatkan Negara-negara besar. Misalnya, pendekatan hukum dan diplomatik adalah cara untuk mempromosikan pemahaman tentang hukum internasional yang mendasari upaya perdamaian regional perbatasan yang kooperatif. Hal ini dapat didefinisikan sebagai hubungan internasional, korelasi dan kepentingan negara. Pemahaman diplomasi dapat dikatakan juga sebagai input interaksi timbal balik antara kedua negara, yang maksudkan untuk memperoleh persetujuan politik luar negeri antara kedua negara. Diplomasi dikaitkan dengan kegiatan damai, tetapi juga dapat terjadi dalam kondisi agresi maupun konflik perang. Diplomasi utamanya bertugas tidak hanya mengelola konflik, tetapi juga mengelola dan memelihara perubahan melalui persuasi yang berkelanjutan seiring dengan perubahan yang terus berlangsung. Dalam konteks konflik di Laut Natuna Utara,

diplomasi dapat dilakukan tidak hanya di negara-negara ASEAN tetapi juga di negara-negara asing ASEAN. Bahkan di forum-forum internasional lain yang dapat membantu membangun perdamaian di kawasan. (Arifianto, 2018).

Untuk peran negara dalam menengahi sengketa Laut Natuna Utara, pemerintah Indonesia memainkan beberapa peran positif yang dapat memperburuk konflik. Saat ini, salah satu peran aktif pemerintah Indonesia dalam meredam perseteruan di Laut Natuna Utara adalah membentuk patroli bersama di Laut Cina Selatan. Melalui patroli bersama yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia, dimungkinkan untuk mencapai komunalitas untuk menyelesaikan konflik dengan negara-negara ASEAN. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia berkeinginan untuk bersama-sama mendukung penyelesaian dan penyelesaian masalah Laut Natuna Utara dalam arti semua negara anggota ASEAN terlibat dalam negosiasi dengan China. Dari sudut pandang teoritis diplomatik internasional, respon pemerintah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang realisme. Hal ini dapat dijelaskan ketika pemerintah Indonesia memprioritaskan kelompok ASEAN untuk menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara, menyerukan kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah melalui kepemimpinan (Wahyudi, 2016).

Di tingkat lain yang lebih kompleks dari aliansi dan kerjasama internasional yang dilakukan oleh Indonesia, Indonesia secara aktif berpartisipasi sebagai perantara antara Cina dan negara-negara Asia Tenggara dalam penggunaan Deklarasi Perilaku atau *Declaration on the Conduct* (DOC) Negara Pihak di Laut Cina Selatan berdasarkan UNCLOS 1982. Konflik di Laut Natuna Utara bukanlah konflik antara keduanya, tetapi terkait dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina dan Vietnam dan negara-negara selain Asia Tenggara seperti Jepang, China dan Taiwan. Regulasi luar negeri Indonesia untuk menyelesaikan konflik regional di Laut Natuna Utara menghadapi kekuasaan Cina adalah sebagai berikut (Usman, 2017):

- 1) Pemerintah Indonesia menyerukan diplomasi dan negosiasi damai.
- 2) Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi prinsip non-intervensi.
- 3) Pemerintah Indonesia menggunakan Deklarasi Perilaku atau *Declaration on the Conduct* (DOC) para pihak di Laut Cina Selatan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Natuna Utara, yang menegaskan pedoman kode etik.
- 4) Tahun 2011 ASEAN mengimplementasikan kode etik konflik Laut Natuna Utara.
- 5) Optimalisasi peran forum regional ASEAN dalam sengketa Laut Natuna Utara.

Tidak hanya seputaran kawasan Asia Tenggara namun dalam tataran Asia-Pasifik Indonesia juga aktif dalam menengahi konflik LNU

dengan politik luar negerinya. Pada 23 Juni 2019, Indonesia bersama pemimpin dan pejabat penting negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), sepakat untuk menyiapkan draft *ASEAN Outlook for the Indo-Pacific* sebagai salah satu legitimasi kebijakan strategi ASEAN ke depan. Sambutan Indonesia terhadap prospek Indo-Pasifik ASEAN tidak berakhir dengan status Indonesia sebagai pencetus gagasan tersebut. Kerjasama yang kompleks antar masyarakat Indonesia dapat mendukung konsep Indo-Pasifik kedepan dan tentunya bermaksud bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini, konsep aliansi yang disetujui dalam *Indo-Pacific Outlook* mencakup empat wilayah, yaitu partisipasi laut, jaringan, pengakuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan partisipasi moneter. (Kumparan.com, 2019).

4. KESIMPULAN

Artikel ini membahas mengenai bagaimana rancang politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi konflik Laut Natuna Utara berdasarkan faktor internal dan eksternal. Dimana rancang bangun politik luar negeri Indonesia pada faktor internal yang didapat menggunakan teori politik luar negeri dari Howard Lentner tepatnya poin *Moderately stable determinants* yang difokuskan pada pengaruh gaya politik suatu negara dalam hal ini Indonesia terhadap dinamisasi konflik Laut Natuna Utara. Adapun pengaruh internal gaya politik Indonesia lebih menekankan pada diplomasi aktif untuk mencari jalan damai dengan membentuk *Declaration of Conduct* (DoC) dan kemudian *Code of Conduct* (CoC) untuk menekan ketegangan konflik di Laut Natuna Utara, namun juga tetap menggunakan politik tegas dengan menerapkan kebijakan perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara sebagai bentuk dukungan pada Mahkamah Peradilan Internasional (*International Arbitration Court*).

Sedangkan rancang bangun politik pada faktor eksternal menggunakan teori politik luar negeri dari Rosenau pada poin *systemic source* atau sumber sistemik dalam artian lebih mengkaitkan pada pengaruh aliansi berupa kerjasama-kerjasama Internasional melibatkan Negara-negara besar. Dalam hal ini Indonesia sangat memanfaatkan kesempatan pertemuan Internasional dalam hal menengahi konflik Laut Natuna Utara diantaranya mengadakan kontrol bersama yang diajukan oleh pemerintah Indonesia tersebut, kolektifitas antara sesama negara ASEAN agar *Conflict De-escalation* dapat tercapai, Kebijakan Prinsip *Non Intervence, Declaration on the Conduct (DOC) of Parties in the South Tiongkok Sea, Optimalisasi Peran Asean Regional Forum* dan menjadi inisiatif awal konsep *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*.

5. REFERENSI

Arifianto, A. (2018). Politik Indonesia Dalam Konflik Laut Cina Selatan Blok Natuna,

- Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah (APPPTMA), ISBN 978-602-50710-6-5 : 15-16.
- Connelly, A.L. (2017). Indonesia di Laut Cina Selatan: Berjalan Sendiri. *Analisis Lowy Institute*: 5.
- Fajri, M.B. (2020). Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1) : 68.
- Fajrina, A.N. (2020). Studi Geopolitik Laut China Selatan: Data Dan Analisis Media Sosial (Geopolitical Studies Of The South China Sea: Data And Analysis Of Social Media). *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 8(2): 131-132.
- George, A. L & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. mit Press.
- Hendrajit. (2017). Pergeseran Sentral Geopolitik Internasional, dari Heartland ke Asia Pasifik. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 5(1) : 33-34.
- Hutama, M.D.P. (2019). Intervensi Negara Ketiga Dan Peran Indonesia Bersama ASEAN Pada Penyelesaian Isu Laut Cina Selatan (LCS). *Jurnal Dinamika Global*, 4(2): 333-338.
- Ilimi, N. (2020). Dampak Penamaan Laut Natuna Utara terhadap Hubungan Bilateral Indonesia Tiongkok. *Journal Of International Relations*, 6(4) : 485.
- Lentner, H. (1974). *Foreign Policy Analysis: A Comparative and Conceptual Approach*, Ohio: Bill and Howell Co.
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 23-48.
- Montratama, I. (2016). Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad Ke-21. *Intermestic : Journal of International Studies*, 1(1) : 38.
- Noventari, W. (2014). Peran Diplomasi Politik Luar Negeri Dan Angkatan Perang Dalam Mewujudkan Stabilitas Nasional, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 27(2) : 122-123.
- Perwinta, A.A.B. (2007). Agenda dan Tantangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif : Sebuah Refleksi Teoretis, *Jurnal Global*, 9(1) : 65-66.
- Pratiwi, Y.D. (2017). Posisi Indonesia Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Lembaga Kerisnet*, 2(2) : 42-43.
- Rosenau, J.N. Boyd, G and Kenneth W. (1976). *Thompson, World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Situmorang, M. (2015). Orientasi Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia 66 di bawah Pemerintahan Jokowi-JK. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1) : 69.
- Toruan, G.R.L. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1): 121-122.
- Umar, H and Naya C.G. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Hegemoni China di Kawasan Laut China Selatan pada Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2016 – 2019. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 41(71) : 8384-8385.
- Usman, R. (2017). Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok Dalam Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan Tahun 2012-2016. *Jom FISIP*, 4(2) : 12-13.
- Utomo, H. (2017). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengelola Konflik Laut China Selatan. *Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik*, 3(1): 68-69.
- Wahyudi, A.H. (2016). Peran dan Strategi Indonesia bersama ASEAN Dalam Upaya Meredakan Konflik Laut China Selatan. *Verity : Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 8(16).
- Yahya, T. "Arti Penting ASEAN Outlook on Indo-Pacific bagi Indonesia". Retrieved From <https://kumparan.com/tantowi-yahya/arti-penting-asean-outlook-on-indo-pacific-bagi-indonesia-1sXMNqs9MGy/full>. diakses pada 24 Agustus 2021.